

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN

Permasalahan hukum sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas tidak berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan, mempertimbangkan bahwa perusahaan bukan merupakan tergugat utama dan tidak terdapat tuntutan yang berpotensi menimbulkan kewajiban finansial kepada IFG. Namun demikian, IFG telah melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memitigasi permasalahan hukum baik dengan melibatkan sumber daya internal maupun konsultan eksternal.

Selain perkara yang dihadapi IFG, terdapat juga permasalahan hukum yang dihadapi/melibatkan Anggota *Holding*. Atas permasalahan hukum Anggota *Holding*, IFG memberikan dukungan/asistensi hukum dengan memberikan kajian hukum, penyusunan strategi penanganan perkara, melakukan pendampingan atau negosiasi. Untuk mengawasi sekaligus mengantisipasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan, IFG senantiasa melakukan *monitoring* secara berkala terhadap perkembangan dari permasalahan hukum yang sedang berlangsung.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Adapun pengungkapan permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat di tahun 2024 sebagai berikut:

Pihak yang Berperkara Litigants	Pokok Perkara Merits of Case	Putusan Pengadilan Verdict	Status Perkara Case Status	Tindak Lanjut Follow-up
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

IMPACT OF LEGAL ISSUES ON THE COMPANY

The legal issues as described in the table above do not have a significant impact on the company's operations, considering that the company is not the main defendant and there are no claims that have the potential to cause financial obligations to IFG. However, IFG has taken actions deemed necessary to mitigate legal issues both by involving internal resources and external consultants.

In addition to cases faced by IFG, there are also legal issues faced/involving holding members. For legal issues of holding members, IFG provides legal support/assistance by providing legal studies, preparing case handling strategies, providing assistance or negotiations. To monitor as well as anticipate the necessary mitigation measures, IFG always conducts regular monitoring of the development of ongoing legal issues.

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES FACED BY THE INCUMBENT BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The disclosure of legal issues faced by the incumbent Board of Commissioners and Directors in 2024 is as follows:

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANGGOTA HOLDING

Adapun pengungkapan permasalahan hukum yang sedang dihadapi Anggota *Holding* sebagai berikut:

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES FACED BY HOLDING MEMBERS

The disclosure of legal issues faced by holding members is as follows:

IFG Group	Kasus Hukum Anggota Holding IFG Tahun 2023-2024 Legal Case of IFG's Holding members in 2023-2024			
	2024		2023	
	Perdata Civil	Pidana Civil	Perdata Civil	Pidana Civil
PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)	4	Nihil None	1	Nihil None
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)	6	Nihil None	8	Nihil None
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)	11	Nihil None	12	Nihil None
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)	11	Nihil None	18	Nihil None
PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
PT Bahana Artha Ventura (BAV)	4	Nihil None	Nihil None	Nihil None
PT Bahana Sekuritas (BS)	4	Nihil None	4	Nihil None
PT Bahana Kapital Investama (BKI)	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
PT Bahana Mitra Investa (BMI)	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)	5	Nihil None	5	Nihil None
Total	45	Nihil	48	Nihil

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

IFG selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2024, IFG tidak menerima sanksi administratif dari otoritas yang berwenang.

DISCLOSURE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELEVANT AUTHORITIES

IFG has always complied with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Therefore, throughout 2024, IFG did not receive any administrative sanctions from the competent authority.